

EKONOMI BISNIS

SEMARANG JAKARTA 9X
 SURABAYA 3X • BANJARMASIN
 DENPASAR 3X • BALIKPAPAN
 Lion Air 0804-1-778899
 www.lionair.co.id

KALSTAR AVIATION
 Fly Smart with Us
 TERBANG DENGAN PESAWAT BARU

Konversi Premium ke Pertamina, Mungkinkah?

SELAMA sebulan terakhir ini, media ramai menyorot berita demo menentang kenaikan harga BBM di berbagai daerah. Tingginya tingkat demo dan semakin meningkatnya keresahan masyarakat-- salah satunya-- karena mekanisme pengambilan kebijakan yang terlalu lama.

Hal ini berdampak negatif. Yaitu, 1. memunculkan potensi penimbunan bagi spekulan bermodal besar namun tidak etis. Kedua, harga-harga produk lainnya sudah mulai naik, meski harga BBM belum naik. Ketiga, melemahnya perekonomian, karena para pelaku pasar cenderung menjadi *risk avoider*.

Pemerintah berpendapat perlu untuk mengurangi subsidi BBM, terutama karena subsidi BBM membebani anggaran dan proses pemberian subsidi justru tidak tepat sasaran. Argumennya adalah, mobil lebih banyak menggunakan BBM, dibanding dengan kendaraan roda dua. Artinya, mobil memanfaatkan subsidi yang lebih banyak.

Masyarakat menilai kebijakan pengurangan subsidi tidak tepat. Sebab, selain membebani



Obit: Stephana Dyah Ayu R

biaya transportasi yang harus mereka tanggung, kenaikan harga BBM, akan berefek domino cukup besar. Yaitu, naiknya harga barang-barang lainnya.

Belajar dari suksesnya kebijakan konversi minyak tanah (bersubsidi) ke gas (tidak bersubsidi), maka alternatif kebijakan yang dapat ditempuh adalah kebijakan mengonversi premium (bersubsidi) ke pertamax (tidak bersubsidi). Namun, dengan syarat dan kondisi tertentu.

Konversi minyak tanah ke gas dinilai cukup sukses, karena dalam mekanisme *pengkonversian*, pemerintah menyediakan sarana dan prasarana pendukung. Seperti tabung gas dan kompor.

Oleh karena itu, jika pemerintah ingin mengambil kebijakan pengurangan harga BBM, maka perlu saran untuk mendukung. Berikut ini beberapa kebijakan yang seharusnya dapat saling berintegrasi untuk meringankan beban rakyat.

Data BPS 2011 menunjukkan bahwa jumlah mobil selama lima tahun terakhir, terus mengalami peningkatan signifikan. Proporsi terbesar, mobil penumpang (57%)

dibandingkan dengan bus (13%) dan truk (20%).

Karena itu, mobil penumpang akan paling banyak terimbas, dibanding jenis mobil lainnya. Dalam transisi penerapan konversi premium ke pertamax, pemerintah harus mempertimbangkan seleksi.

► Baca *Konversi ...* hal 11

Rubrik ini Kerja Sama
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 Unika Soegijapranata Semarang

"Buat saya, selain *traveling*, jalan-jalan juga bermanfaat untuk

nonon hlm dan renang. (ars) aro/ce1

Monahanu Sanyu me... cara keseluruhan jaringan online

SMP N 3 Semarang...

Low Cost Car Perlu Dilakukan

■ KONVERSI
 Sambungan dari hal. 3

Dibanding menyeleksi berdasarkan kapasitas mobil (cc) yang sangat menyulitkan bagi pihak SPBU, rencana pemerintah untuk membatasi jenis/merek kendaraan merupakan salah satu alternatif yang dapat dipilih. Tentu saja, pelaksanaannya harus mempertimbangkan dampak kebijakan ini pada industri otomotif.

Model kebijakan pendukung lain yang dapat diterapkan adalah mengintegrasikan model *Low Cost Car*. Mobil murah yang akan diluncurkan, merupakan mobil

berbiaya rendah yang di-*setting* menggunakan pertamax.

Fenomena di lapangan menunjukkan umumnya orang Indonesia menggunakan mobil secara jangka panjang. Masih banyak mobil berusia lebih dari sepuluh tahun yang digunakan oleh masyarakat. Mobil-mobil tersebut umumnya sudah tidak efisien lagi, sehingga menggunakan bahan bakar bersubsidi cukup besar.

Pemerintah sebaiknya memberikan kemudahan bagi para pemilik mobil keluaran lama, untuk beralih kepada *Low Cost Car*.

Dengan beralihnya pengguna mobil-mobil tua yang berbahan

bakar premium ke mobil murah berbahan pertamax, maka penggunaan anggaran pemerintah untuk subsidi bisa semakin ditekan.

Secara kumulatif, kebijakan ini akan membatasi tahun penggunaan mobil. Selain menekan pengeluaran pemerintah, peralihan ini akan mendorong pertumbuhan industri otomotif. Juga berdampak semakin baik pada lingkungan. Sebab tingkat pencemaran udara dapat semakin ditekan.

Kebijakan pendukung lainnya adalah penyediaan transportasi publik yang memadai. Hal ini wajib dilakukan untuk memberikan peluang masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi

ke angkutan secara massal.

Jika penggunaan mobil pribadi turun, maka tingkat kemacetan akan turun. Jika kondisi jalan lancar, maka penggunaan bahan bakar menjadi lebih efisien. Dengan demikian, penggunaan bahan bakar akan menjadi semakin menurun.

Lebih lanjut kebijakan ini akan memberi alternatif sarana transportasi yang layak bagi masyarakat yang tidak mampu untuk beralih ke pertamax. (*/Ask/ce1)

Penulis adalah Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata Semarang